

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan politik identitas dalam sebuah negara merupakan salah satu konsekuensi logis dari diterapkannya paham demokrasi di negara tersebut. Kondisi masyarakat yang multikultur menyebabkan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari politik identitas. Politik identitas ini, terbentuk sebagai wujud dari interaksi yang terjadi di antara nilai-nilai demokrasi yang menjadi mainstream dengan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai lain yang sudah terbentuk sebagai sebuah struktur sosial di masyarakat. Di Indonesia sendiri, isu-isu mengenai politik identitas sudah banyak bermunculan. Etnisitas merupakan basis yang sering mendasari munculnya politik identitas di Indonesia. Hal ini tentunya bukan merupakan sesuatu yang mengejutkan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis dan budaya yang memiliki nilai, pandangan, identifikasi dan kearifannya masing-masing. Pemahaman akan politik identitas perlu menjadi perhatian agar mampu menghindari ekspresi politik identitas yang berlebihan yang dapat mengancam integritas bangsa Indonesia.¹

Studi keterlibatan identitas etnis dalam proses demokratisasi di aras lokal merupakan sebuah fenomena baru. Umumnya studi politik lokal lebih berpusat pada konflik elit-elit politik lokal dalam memperebutkan dan mempertahankan

¹ Rendy Adiwilaga, et, al. (2017). Pemilu dan keniscayaan politik identitas etnis di Indonesia : Sebuah tinjauan teoritis. *Jurnal Bawaslu* Volume 3 Nomor 2.Hal 270

kekuasaan. Politik identitas etnis adalah *conditio sine qua non* sebagai akibat dari negara yang terbentuk dari multi-etnis. Kelompok-kelompok etnis tidak terlepas dari identitas budaya mereka. Pada kondisi masyarakat seperti ini perselisihan politik etnis seringkali masih menjadi persoalan karena kesadaran etnis melekat tidak hanya pada tataran budaya tetapi sampai dengan kesadaran identitas diri dan manusianya. Relasi-relasi politik etnis diperkuat oleh kepentingan-kepentingan ekonomi pada beberapa kasus.²

Praktik politik identitas di Indonesia lebih dominan terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan aktor-aktor lokal yang diartikulasikan melalui pemekaran daerah. Isu yang digunakan oleh para aktor lokal mengenai ketidakadilan pembangunan yang menjadi "*politik bargaining*" yang dikemukakan dalam setiap kesempatan. Namun demikian, ambisi-ambisi para aktor lokal ini dianggap hanya sebagai naluri untuk memimpin kepentingan kelompoknya demi tujuan ekonomi-politik. Berbagai hasil studi menjelaskan, bahwa desentralisasi adalah faktor penentu munculnya politik identitas. Dengan besarnya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada daerah di era reformasi membuat semakin mantapnya posisi aktor-aktor lokal meraih kekuasaan di arena politik lokal. Tidak hanya itu, praktik politik dimasa desentralisasi menjadikan isu etnisitas, agama dan golongan sebagai alat legitimasi politik dalam meraih kekuasaan.³

² Yohanes Frian Jadi (2016). Keterlibatan Etnis Pada Pilkada Kabupaten Sikka 2013. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Nusa Cendana. Kupang. Hal 1

³ Saradi Wantona, et, al. (2018). PRAKTIK POLITIK IDENTITAS DALAM DINAMIKA POLITIK LOKAL MASYARAKAT GAYO. *Solidarity: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Volume 6 Nomor 1. Institut Pertanian Bogor. Hal 79

Terlepas dari berbagai permasalahan yang ada, pilkada masih bisa dikatakan sebagai sebuah proses demokratisasi politik di aras lokal, di mana adanya partisipasi langsung masyarakat dalam rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga adanya hubungan yang baik antara elit dan massa. Untuk mempercepat demokratisasi di aras lokal walaupun masih banyak kejanggalan dalam melaksanakan substansi dari Pilkada itu sendiri. Persaingan etnis semakin berkejolak terjadi di daerah setelah ditetapkan pemilihan secara langsung pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Pembelahan etnis terjadi di setiap Pilkada dengan dasar persamaan etnis antara massa pendukung dari masing-masing pasangan calon yang diusungkan. Kabupaten Malaka memiliki 12 Kecamatan dengan jumlah penduduk 177.892 jiwa. Berikut ini adalah gambaran penduduk tiap Kecamatan di Kabupaten Malaka tahun 2015 :

Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Malaka Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah
1	Wewiku	18.583
2	Malaka Barat	20.684
3	Weliman	18.358
4	Rinhat	15.117
5	Io Kufeu	7.959
6	Sasitamean	8.569
7	Malaka Tengah	38.514
8	Botin Leobebe	4.956
9	Laen Manen	11.490
10	Malaka Timur	9.531
11	Kobalima	17.539
12	Kobalima Timur	6.592
Total		177.892

Sumber : Malaka Dalam Angka (2015)

Ditinjau dari segi budaya dan antropologis, penduduk kabupaten Malaka dalam susunan masyarakatnya terbagi atas dua sub etnik besar, yaitu EmaTetun

dan Ema Dawan (R). Ema Tetun mayoritas mendiami dataran rendah yang membentang dari Kobalima Timur hingga Wewiku dan sebagian wilayah dataran tinggi di Rinhat, Io Kufeu, Botin Leobebe, Malaka Timur. Sedangkan Ema Dawan (R) mendiami sebagian besar wilayah Io Kufeu, Sasitamean, Botin Leobebe dan Laenmanen.

Tabel 1.2
Daftar Pemilih Dan Suara Sah Hasil Hitung TPS (Form C1)
Kabupaten Malaka Provinsi NTT 2015

No	Kecamatan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	Data Masuk
1	Botin Leo Bele	3878	2847	2441	46	2487	100%
2	Io Kufeu	6390	3907	3851	56	3903	100%
3	Kobalima	13317	8415	8298	117	8415	100%
4	Kobalima Timur	4701	3030	2972	61	3033	100%
5	Laen Manen	10723	6124	6066	58	6094	100%
6	Malaka Barat	1882	10192	10083	110	10193	100%
7	Malaka Tengah	30712	18186	17864	171	18035	100%
8	Malaka Timur	6735	4884	4785	99	4884	100%
9	Rinhat	9889	6694	6593	101	6694	100%
10	Sasitamean	5967	4409	4391	18	4409	100%
11	Weliman	14820	9290	9166	117	9286	100%
12	Wewiku	14285	8748	8620	128	8748	100%

Sumber : KPU (2015)

Tabel 1.3
Perolehan Suara Sah masing-masing Calon Bupati
Dalam Pilkada Kabupaten Malaka Provinsi NTT 2015

No	Kecamatan	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3	
		Suara	%	Suara	%	Suara	%
1	Botin Leobebe	64	2.62	1.036	42.44	1.341	54.94
2	Io Kufeu	87	2.26	1.114	28.93	2.650	68.81
3	Kobalima	586	7.06	4.167	50.22	3.545	42.72
4	Kobalima Timur	256	8.61	1.365	45.93	1.351	45.46
5	Laenmanen	193	3.18	1.948	32.11	3.925	64.70
6	Malaka Barat	708	7.02	6.669	66.14	2.706	26.84
7	Malaka Tengah	643	3.60	9.442	52.85	777.9	43.55
8	Malaka Barat	883	18.45	1.032	21.57	2.870	59.98
9	Rinhat	203	3.08	4.199	63.69	2.191	33.23
10	Sasitamean	17	0.39	2.751	62.65	1.623	36.96
11	Weliman	762	8.31	6.067	66.19	2.337	25.50
12	Wewiku	673	7.81	4.986	57.84	2.961	34.35
Total		5.075		44.776		35.279	

Sumber: KPU (2015)

Berdasarkan data perolehan suara pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Malaka tahun 2015 pasangan calon nomor urut satu memperoleh suara sebanyak 5075 dan pasangan calon nomor urut dua memperoleh suara sebanyak 44,776 sedangkan pasangan calon nomor urut tiga memperoleh suara sebanyak 35.279. Dari data perolehan suara di atas pemilih lebih memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari etnik yang sama-sama berasal dari etnik mereka.

Contohnya di daerah dataran rendah/etnik Ema Tetun seperti Kecamatan Wewiku, Weliman, Malaka Barat, Malaka Tengah, Kobalima, Kobalima Timur suara di donimasi oleh pasangan calon nomor urut dua karena calon Bupati dr. Stefanus Bria Seran, MPH berasal dari Etnik Ema Tetun. Pasangan calon nomor urut dua juga memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sasitamean yang mayoritas penduduknya adalah etnik Ema Dawan(R). Karena calon wakil bupati nomor urut dua Drs. Daniel Asa berasal dari Kecamatan Sasitamean. Sedangkan di daerah dataran tinggi/Foho/etnik Ema Dawan (R) suara di dominasi oleh paket nomor urut tiga karena calon bupati Taolin Ludovikus, BA berasal dari etnik Ema Dawan (R). Oleh karena itu penulis mau melakukan penelitian dengan judul: Evaluasi Penerapan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malaka Tahun 2015 (Studi Kasus Kecamatan Malaka Barat dan Malaka Timur). Berikut ini adalah perolehan suara sah masing-masing calon bupati di kecamatan Malaka Barat dan Malaka Timur tahun 2015 :

Tabel 1.4
Perolehan Suara Sah masing-masing Calon Bupati di
Kecamatan Malaka Barat Dalam Pilkada Kabupaten Malaka Provinsi NTT
Tahun 2015

No	Desa	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3	
		Suara	%	Suara	%	Suara	%
1	Besikama	34	4.79	370	54.09	280	40.94
2	Fafoe	134	13.32	599	59.54	273	27.14
3	Lasaen	48	6.05	535	67.38	211	26.57
4	Loofoun	6	1.55	319	82.43	62	16.02
5	Maktihan	7	0.94	532	71.41	206	27.65
6	Motaain	19	5.97	132	41.51	167	52.52
7	Motaulun	23	2.81	654	79.85	142	17.34
8	Naas	17	3.26	332	63.60	173	33.14
9	Oan Mane	24	4.63	426	82.24	68	13.13
10	Rabasa	42	15.27	177	64.36	56	20.36
11	Rabasa Haerain	204	37.64	256	47.23	82	15.13
12	Rabasahain	47	9.81	316	65.97	116	24.22
13	Raimatus	14	3.83	248	67.76	104	28.42
14	Sikun	9	1.69	387	72.47	138	25.84
15	Umalar	21	2.69	487	62.36	273	34.96
16	Umatoos	59	4.49	899	68.47	355	27.04
Total		708		6.669		2.706	

Sumber: KPU (2015)

Berdasarkan data pada tabel 1.4 di atas pasangan calon nomor urut dua selalu unggul di 15 desa di Kecamatan Malaka Barat karena kecamatan Malaka Barat mayoritas penduduknya adalah etnis Ema Tetun.

Tabel 1.5
Perolehan Suara Sah masing-masing Calon Bupati di
Kecamatan Malaka Timur Dalam Pilkada Kabupaten Malaka Provinsi NTT
Tahun 2015

No	Desa	Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3	
		Suara	%	Suara	%	Suara	%
1	Dirma	196	32.29	159	26.19	252	41.52
2	Kusa	36	4.30	151	18.04	650	77.66
3	Numponi	100	8.09	234	18.93	902	72.98
4	Raiulun	94	22.76	43	10.41	276	66.83
5	Sanleo	345	35.57	307	31.65	318	32.78
6	Wemeda	112	15.51	138	19.11	472	65.37
Total		883		1032		2870	

Sumber: KPU (2015)

Berdasarkan data pada tabel 1.5 di atas pasangan calon nomor urut tiga selalu unggul di 6 desa di Kecamatan Malaka Barat karena kecamatan Malaka Timur mayoritas penduduknya adalah etnis Ema Dawan(R). Oleh karena itu untuk membuktikannya penulis tertarik menelitinya dengan Judul Penerapan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malaka (Studi Kasus di Kecamatan Malaka Barat dan Malaka Timur).

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan judul di atas maka perumusan masalahnya adalah Bagaimana Penerapan Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Malaka Barat dan Malaka Timur).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi penerapan politik identitas dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Malaka tahun 2015 (Studi Kasus di Kecamatan Malaka Barat dan Kecamatan Malaka Timur).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan sosial tentang keterlibatan etnis dalam pilkada, serta dinamika pembangunan dan perpolitikan di daerah, bagi disiplin ilmu social dan politik khususnya studi tentang etnis dalam politik lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua sebagai makhluk social, agar dapat saling menghargai dan menerima perbedaan etnis yang ada di Indonesia, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang tertarik pada kajian etnis di aras lokal khususnya di Kabupaten Malaka.